



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 31 Januari 2023/Periodik - 2022)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : PEMERINTAH KABUPATEN PANGANDARAN
UNIT KERJA : SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

I. DATA PRIBADI

1. Nama : **DEDIH RAKHMAT**
2. Jabatan : **KEPALA SATUAN**
3. NHK : **794889**

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN **Rp. 278.515.000**

1. Tanah dan Bangunan Seluas 590 m2/42 m2 di KAB / KOTA PANGANDARAN, HASIL SENDIRI Rp. 115.610.000
2. Tanah Seluas 1631 m2 di KAB / KOTA PANGANDARAN, HASIL SENDIRI Rp. 16.310.000
3. Tanah Seluas 1131 m2 di KAB / KOTA PANGANDARAN, HASIL SENDIRI Rp. 11.310.000
4. Tanah Seluas 428 m2 di KAB / KOTA PANGANDARAN, HASIL SENDIRI Rp. 6.000.000
5. Tanah Seluas 1250 m2 di KAB / KOTA PANGANDARAN, HASIL SENDIRI Rp. 89.285.000
6. Tanah Seluas 2070 m2 di KAB / KOTA PANGANDARAN, HASIL SENDIRI Rp. 30.000.000
7. Tanah Seluas 280 m2 di KAB / KOTA CIAMIS, HASIL SENDIRI Rp. 10.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN **Rp. 150.000.000**

1. MOBIL, HONDA BRIO RS Tahun 2018, HASIL SENDIRI Rp. 100.000.000
2. MOTOR, YAMAHA X RIDE SEPEDA MOTOR Tahun 2015, HASIL SENDIRI Rp. 5.000.000
3. MOTOR, KAWASAKI LX 150 Tahun 2016, HASIL SENDIRI Rp. 15.000.000



4. MOTOR, VESPA SPRINT IGET 150 ABS Tahun 2019, HASIL
SENDIRI Rp. 30.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 62.913.000

D. SURAT BERHARGA Rp. ----

E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 10.000.000

F. HARTA LAINNYA Rp. ----

Sub Total Rp. 501.428.000

III. HUTANG Rp. 316.981.901

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III) Rp. 184.446.099

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.